

Amsakar Minta Pejabat Laporkan Harta Kekayaan

BATAM, TRIBUN - Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengingatkan, batas akhir pengisian laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) sudah semakin dekat. Saat ini, sebanyak 264 orang pejabat Pemko Batam, diketahui belum mengisi LHKPN-nya. Sementara 669 orang sudah mengisi daftar harta kekayaannya.



Amsakar Achmad

eselon IV yang bersentuhan dengan kegiatan. Serta pegawai yang ditugaskan menjadi bendahara.

Amsakar mengatakan, sebelum ini Pemko Batam sudah mendapat asistensi dari tim koordinasi, supervisi, pencegahan (korsupgah) KPK. Jangan sampai pejabat yang sudah mendapat supervisi ini malah tidak melaksanakan kewajibannya melapor harta kekayaan.

"E-filling dari KPK memerlukan tingkat kepatuhan penyelenggara negara atau yang wajib lapor LHKPN sebesar 72 persen," kata Amsakar sebagaimana dikutip dalam humas.batam.go.id, Rabu (28/3).

Kepada 28 persen pejabat yang belum lapor, Amsakar meminta untuk segera melapor sebelum 31 Maret 2018. Adapun pejabat yang wajib mengisi LHKPN ini, yaitu seluruh eselon II dan eselon III. Kemudian

"Yang merasa punya kegiatan, punya proyek, lapor. Eselon II dan Eselon III seluruhnya wajib," ujarnya.

Secara khusus Amsakar mengingatkan pentingnya pelaporan itu. Apabila menyampaikan pada 1 April mendatang, maka hasil evaluasi 28 persen pejabat yang belum melapor harta kekayaan ini tidak bisa diperbaiki. (*/wie)

Pengadaan Komputer UNBK Dicoret

► Ricky Kesal tak Dianggarkan di APBD

BATAM, TRIBUN - Pengadaan komputer UNBK sebelumnya pernah dicoret dan ditolak oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam pada pembahasan anggaran 2018 lalu. Ternyata pengadaan komputer untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tak bisa dianggarkan kembali di APBD Perubahan. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Ricky Indrakari.

"Karena merupakan suatu kegiatan yang baru. Komisi

IV sudah berusaha anggar, tapi dicoret disdik. APBD perubahan juga tak bisa," kata Ricky Indrakari, Selasa (27/3).

Padahal menurutnya jika berbicara perihal terkait pendidikan, ada tiga pilar yakni pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu dan daya saing serta peningkatan kualitas dan mutu guru.

Sementara mutu dan persaingan inilah yang berhubungan dengan UNBK. Bukan hanya menyangkut penambahan bangunan se-

kolah saja.

Dalam pengadaan di 2019 tahun depan, dirinya sudah tak ingin lagi berkomentar. Baginya sudah hal yang percuma sesuatu yang sudah masuk anggaran tiba-tiba dicoret begitu saja.

"Hanya karena alasan rasionalisasi malah dicoret," sesalnya.

Ia melanjutkan UNBK ini merupakan bagian kegiatan yang diwajibkan oleh Kementerian Pendidikan. Bukan untuk kepentingan pribadi saja," katanya. (rus)